

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan salah satu metode politik. Salah satu warga negara telah diberi suatu kesempatan dalam memilih salah satu pimpinan politik yang melakukan persaingan meraih suara. Pada pemilihan selanjutnya warga negara dapat mengganti wakil yang dapat di pilih sebelumnya. Kesempatan memilih tersebut dapat diartikan sebagai inti dari Demokrasi.

Demokrasi dapat diartikan hak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jatuhnya orde baru membukanya peluang reformasi politik serta demokrasi yang berada di Indonesia. Pada pengalaman orde baru telah mengajarkan kepada Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa hancurnya bagi Indonesia. Oleh sebab itulah Indonesia berembuk adil untuk melakukan suatu demokrasi ulang, yaitu proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan yang dimiliki rakyat dapat terbentuk, kedaulatan juga dapat ditegakan, serta pengawasan lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Budiardjo, 2008).

Dengan adanya Demokrasi di Negara Indonesia tersebut rakyat dapat menentukan pilihannya sendiri serta dapat menyalurkan aspirasi melalui Pemilu. Demokrasi tersebut memiliki tiga persyaratan yaitu: Dalam Demokrasi dilakukannya suatu kopetisi dan dalam kopetisi tersebut berlomba untuk memperebutkan serta mempertahankan suatu kekuasaan yang dapat diduduki oleh peserta, Partisipasi dari masyarakat, serta adanya suatu jaminan hak sipil serta politik. Hal tersebut sistem pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi dalam mewujudkan ketiga persyaratan tersebut. Di Indonesia telah dilakukan Pemilu berulang-ulang yang dapat disebut dengan pesta Demokrasi Pancasila.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hal penting untuk menegakan nilai demokrasi, arti pemilu secara umum adalah suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil berdasarkan yang ditetapkan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bicara dengan adanya pemilu sendiri semua partai politik ikut serta mengikuti.

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Undang-undang no.10 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, serta DPRD telah menyebutkan daftar calon yang telah disusun partai politik kurang lebih sekitar 30 persen keterwakilan perempuan. Serta pasal 56 ayat 2 telah menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang tersebut bakal calon kurang lebih 1 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwasannya dilakukannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 7 Tahun 2013 pada pasal 11b, 11d, 24 ayat 1c-d dan ayat 2.

Keterlibatan caleg perempuan ini dalam dunia perpolitikan telah didasarkan dari beberapa aspek, selain untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam legislatif ini juga untuk meningkatkan derajat perempuan di dunia perpolitikan. Semua calon legislatif sebelum menjadi anggota legislatif kebanyakan belajar perpolitikan setelah turun langsung di partai namun tekad yang kuat mereka dapat menduduki kursi legislatif.

Keterwakilan perempuan dalam Legislatif sekarang ini memiliki peran yang sangat penting. Dan sekarang ini kedudukan perempuan dalam keterwakilan dapat diharapkan mampu menjadi alat suatu kontrol dalam jalannya roda pemerintah serta menyalurkan aspirasi daerah untuk perubahan tersebut. menurut pandangan PPP tentang aturan 30% keterwakilan caleg perempuan partai tersebut bersepakat atas aturan itu. Terkait keterwakilan perempuan dalam caleg ini adalah norma *affirmative action*, ketentuan yang lebih maju lagi adalah *affirmative action* adalah adanya penerapan *zipper system*, sistem tersebutlah

mengetur bahwa setiap tiga bakal calon terdapat sedikitnya hanya satu perempuan. Hal ini menyangkut dalam pasal 55 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008 .

Keterwakilan perempuan dari partai politik islam merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kuota 30% serta sebagaimana perempuan juga berhak mampu mengeluarkan suara dalam dunia perpolitikan. Perempuan juga memiliki suatu eksistensi yang tak pernah dinomorduakan islam, perempuan memiliki harkat kelurahan yang diakui islam. Selain itu juga kaum perempuan aktif dalam memainkan perannya politis yang lain pada masa Khulafaur Rasyidin, seperti Ummahat al-Mu'minin, istri nabi Muhhammad yang menjadinya motivator penggerak para perempuan. Hingga saat ini konsep perempuan dalam islam pada saat ini memiliki potensi besar dalam wacana pembangunan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai yang berada di Indonesia. Pada saat pendeklarsiannya pada tanggal 5 Januari 1937 partai PPP ini merupakan suatu hasil gabungan empat partai keagamaan atau partai yang menyangkut nilai islam yang berada di Indonesia yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tabiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi. Partai Persatuan Pembangunan sendiri disebut partai islam karena menilai nilai-nilai agama islam dan juga, jika dibandingkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan partai Golkar yaitu mulai dari aspek-aspek berbanding jauh karena partai PPP itu sendiri nilai Islam nya lebih di utamakan dibanding juga partai lainnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik karena Indonesia mayoritas beragama muslim serta partai PPP dapat memperdalam atau meperkuat nilai-nilai agama ataupun berasas islam di dalamnya, walaupun partai PPP terkenal dengan nilai agama yang tinggi, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.hal tersebutlah ditegaskan dalam pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung

2011 bahwa Selain itu juga PPP yang berdiri sejak orde baru tahun 1973. Berdirinya partai PPP sejak tahun 1973 termasuk sudah lama dan lebih berpengalaman akan di dunia perpolitikan itu sendiri.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sleman yang terletak di Yogyakarta untuk pemilu tahun 2019 diikuti oleh calon Legislatif. Pada pemilihan tahun 2019 ini di Kabupaten Sleman sendiri terbagi menjadi 6 dapil dan hanya satu yang dapat menduduki kursi tersebut yaitu di dapil 5. Memang partai PPP dari tahun ketahunnya keterwakilan perempuan hanya kurang lebihnya di bilang sangat sedikit.

Yogyakarta yang tepatnya di Kabupaten Sleman pemilu pada tahun 2019 keterwakilan perempuan yang telah menduduki di Legislatif kurang lebih mencukupi tapi yang sangat besar, karena minat perempuan yang kurang di dunia perpolitikan. Berdasarkan data yang di dapatkan di KPU Kabupaten Sleman keterwakilan perempuan saat pemilu 2019 yang menduduki hanya satu perempuan. Para caleg juga memang tidak sebanyak yang di inginkan. Selain memenuhi kuota 30% para perempuan hanya untuk meningkatkan drajat di dunia perpolitikan. Para calon juga biasanya sebelum terjun menjadi anggota legislatif kebanyakan belajar di dunia perpolitikan setelah memasuki dunia politik.

Di Yogyakarta sendiri partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 7 dapil , keterwakilan perempuan yang lolos di legislative hanyalah di Kabupaten Sleman sementara di Provinsi Yogyakarta atupun Kota tidak ada satu pun yang dapat mendudukinya, dan hanya terdapat di dapil 5 dari Kabupaten Sleman.

Tabel 1.1. Jumlah Caleg Terpilih Partai Islam
PPP, PKS, dan PBB Tahun 2019
Kabupaten Sleman

No.	Nama Partai	Dapil	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-----	-------------	-------	-----------	-----------	--------

1.	PPP	Dapil 1	-	-	-
		Dapil 2	-	-	-
		Dapil 3	1	-	1
		Dapil 4	-	-	-
		Dapil 5	-	1	1
		Dapil 6	1	-	1
			2	1	3
2.	PKS	Dapil 1	1	-	1
		Dapil 2	1	-	1
		Dapil 3	-	1	1
		Dapil 4	1	-	1
		Dapil 5	1	-	1
		Dapil 6	1	-	1
			5	1	6
3.	PBB	Dapil 1	-	-	-
		Dapil 2	-	-	-
		Dapil 3	-	-	-
		Dapil 4	-	-	-
		Dapil 5	-	-	-
		Dapil 6	-	-	-
			0	0	0

Sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/>

Tabel 1.2. Jumlah dan Persentase Caleg Partai Islam
PPP Tahun 2019 Kabupaten Sleman

No.	Nama Partai	Dapil	Caleg Laki-laki		Caleg Perempuan		Jumlah	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Partai Persatuan Pembangunan	Dapil 1	2	67%	1	33%	3	100%
2.		Dapil 2	2	67%	1	33%	3	100%
3.		Dapil 3	2	50%	2	50%	4	100%
4.		Dapil 4	3	60%	2	40%	5	100%
5.		Dapil 5	4	67%	2	33%	6	100%
6.		Dapil 6	3	50%	3	50%	6	100%
	Jumlah		16	60%	11	40%	27	100%

Sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara perempuan dan laki-laki berbanding sama karena yang dapat menduduki kursi legislatif sama-sama satu perempuan dan satu laki-laki, sementara itu calon legislatif berbanding sedikit karena memang secara keseluruhan laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman rata-rata dapat disimpulkan yaitu kurangnya partisipasi serta minat yang didapatkan.

Dibandingkan dengan partai politik Islam yang terletak Provinsi Yogyakarta atau Kota Yogyakarta partai PPP ini cukup unggul karena Kabupaten Sleman lolos dalam menduduki kursi Legislatif walaupun hanya satu orang saja. Tetapi Provinsi Yogyakarta serta Kabupaten Yogyakarta dapat memenuhi kuota yang ada.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keterpilihan perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui keterpilihan perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman?
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoris hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian mengenai representasi perempuan dalam partai politik islam. Secara subjektif, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan untuk berfikir secara ilmiah serta dapat menambah pengetahuan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam berpolitik.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat membantu pembaca untuk mengetahui keterwakilan perempuan agar lebih berkontribusi dalam hal politik dengan bagaimana perempuan berpartisipasi dalam hal berpolitik serta dapat menjadikan referensi di kalangan yang terkait melakukan kajian penelitian di bidang ini, juga dimanfaatkan oleh partai politik islam untuk menjadikan acuan yang dapat bisa diperbaiki dalam pelaksanaan.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Isnaini Rodiyah (2016)	Keberadaan perempuan saat ini dalam <i>council</i> ternyata saat ini belum juga mencapai quota 30% dan juga belum memenuhi keterwakilan jumlahnya pemilih perempuan secara seluruh. Ukuran council akan menjadi kecil dengan mengacu kepada persyaratan pertimbangan kualitas keanggotaan serta perencanaan administrasi. Saat ini strategi yang dapat dibutuhkan untuk mempersiapkan perempuan sebagai anggota DPRD diawali dari keseriusan partai politik dalam memberi fasilitas serta mempersiapkan perempuan untuk tampil di zona politik serta peningkatan pendidikan politik perempuan terhadap masyarakat.
2.	Kontribusi Keterwakilan Perempuan	Adapun relasi antara keterwakilan politik

	di Legislatif dalam Indeks Pembangun Gender (IDG), Indra Kartati, (2019)	perempuan dengan keberdayaan perempuan. Perempuan saat di parlemen sebagai indikator terhadap pencapaian IDG memberikan informasi keberdayaan perempuan. Perempuan dilegislatif menjadikan indikator yang dominan akan berada di jangkauan stasis pada saat pemilu ini berlangsung. Selama ini perempuan di legislatif haruslah menjadikan prioritas yang utama akan mewujudkan suatu amanah atau suatu titipan pencapaian quota 30 persen. Saat ini kondisi di Indonesia berada pada ranking mencapai 110 dari 142 negara pada posisi perempuan legislatif dengan angka kurang dari 20%.
3.	Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru, Esty Ekawati, (2018).	Partai politik (Parpol) sangat memiliki fungsi penting dalam upaya ppelebangan partai. Melalui rekrutmen partai politik dapat menjaga kelangsungan partai serta menyediakan jabatan politik. Berdasarkan hasil pemilihan umum pasca orde baru, volatilitas keterwakilan telah dialami kandidat perempuan. Ada beberapa kendala terhadap kandidat perempuan yaitu masih saja kurangnya kepercayaan diri yang di alami perempuan untuk mengikuti kontestan saat pemilu berlangsung, terbatasnya modal ekonomi dan sosial politik, budaya patriarki yang masih saja berkembang di Indonesia serta pragmatisme parpol yang lebih mengutamakan caleg yang memiliki popularitas yang lebih. Jika problematika yang dihadapi oleh kandidat perempuan ini tidaklah dibatasi dan dikhawatirkan partai politik menjadi semakin pragmatis dan tidak inklusif terhadap perempuan.
4.	Perempuan dan Komunikasi Politik: Strategi Meraih Suara Perempuan di Pemilihan Umum Melalui Metode Gender Trends, Endhar Priyo Utomo, (2019)	Terdapat perbedaan yang sangat di amat mencolok perbedaan ini antara pemilih perempuan serta pemilih laki-laki saat mengambil sebuah keputusan. Perbedaan itu dapat dikelompokkan menurut metode pemasaran <i>Gender Trends</i> , antara lain potensi suara perempuan dalam pemilu, dimensi peningkat suara perempuan dalam pemilu, faktor peningkat serta strategi meraih suara. Harapannya dapat

		di jadinya sebagai dasar bagaimana seseorang kandidat yang menginginkan untuk menarik minat perempuan agar dapat memilih dalam konstelasi saat pesta Demokrasi saat ini.
5.	Wajah Politik Perempuan: studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Anis Izdiha, (2017)	Keterlibatan perempuan dalam politik hanya sebatas merespon adanya sistem, masuknya ke dalam parpol dengan alasan yang kuat kebijakan kuota, dengan melakukan kampanye dengan strategi individu serta kolektif, serta kebanyakan masuk ke dalam parlemen tanpa memiliki suara yang kuat. Orientasi perilaku politik perempuan DIY masih saja kuat terpengaruh oleh budaya budaya tertentu serta agama yang saat ini mereka pahami. Sikap yang cenderung menghindar dari konflik pada kampanye yang mereka lakukan hanya pasrah atau pun menerima keputusan yang di dapatkan saat ini.
6.	Menekar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan, Juwita Hayyuning Prastiwi, (2018).	Terbukti secara empiris, sistem pemilihan umum secara netral gender terbukti karena akibat munculnya suatu kesenjangan gender. Contohnya saja saat berlomba untuk meraih dukungan atau perempuan akan mengalami banyaknya kendala saat aturan pemilu disusun berdasarkan logika liberal. Adanya empat unsur yang membentuk sistem pemilihan umum (pemilu) di dalam UU 7 tahun 2017 tidaknya memungkinkan signifikan perempuan. <i>District Magnitude</i> sebanyak 3-10 kursi tidaknya perubahan dari pemilu 2009 dan 2014, <i>Nomination</i> yang berbasis parpol menjadi tidak efektif karenanya keharusan berhadapan dengan proposional daftar terbuka, <i>Balloting</i> diberikan pada partai ataupun kandidat, dan <i>Electoral formulae</i> dengan metode divisor yang semangat untuk memudahkan partai yang kecil mendapatkan kursi.
7.	Peran Wanita Persatuan Pembangunan dalam Rekrutmen Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan, rudi Salam sinaga, (2018)	WPP atau disebut sebagai Wanita Persatuan Pembangunan merupakan badan otonim perempuan satu-satunya yang berada di PPP. Saat itu Wanita Persatuan Pembangunan dibentuk untuk meningkatkan kualitas perempuan

		<p>umumnya meningkatkan partisipasi kader perempuan PPPdi kalangan politik. Banyaknya program yang telah dilaksanakan oleh WPP untuk mempersiapkan perempuan yang lebih berkualitas seperti contohnya TOT atau Training of Trainers. Hal tersebut dilakukan WPP pada pada rekrutmen perempuan PPP saat pemilu 2009. Saat pemilu 2009 keterwakilan perempuan yang akhirnya mendapatkan kedudukan atau mendapat tempat di DPR hanya mencapai 13% yaitu 5 perempuan dari 32 laki-laki dari PPP yang duduk atau mendapatkan tempat di DPR-RI.</p>
8.	<p>Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pecalon Legislatif, Nuni Siviana, (2013)</p>	<p>Pada ketentuan kuota bagi perempuan dalam kepengurusan parpol serta pencalonan legislatif telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dikarenakan undang-undang ini menghendaki agar dilakukannya afirmatif dalam memperjuangkan hak politik perempuan.</p>
9.	<p>Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislatif DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014, Eka Yulyana, (2017).</p>	<p>Pada keterlibatan politik perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tepatnya di Kabupaten Karawang terbilang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat dilihat dari segi mana pun yaitu dari segi proses Legislasi, segi kuota serta produk hukum yang didapatkan atau dihasilkan. Pada hakikatnya tersebut politik perempuan bukan hanya memilih kuota tetapi bagaimana keterwakilan itu dapat memberikan suatu kebijakan yang dapat menyuarakan kebutuhan kaum perempuan.</p>
10.	<p>Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Memenangkan Calon Legislatif Perempuan Menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2014, Dwi Noviani, (2015)</p>	<p>Partai PPP atau Partai Persatuan Pembangunan sangat amat berpartisipasi dengan keterlibatan perempuan di suatu lembaga Legislatif serta pengembangan program kesetaraan gender harus di dasari nilai-nilai Islam. Pada Pemilu 2014 PPP atau Partai Persatuan Pembangunan telah menggunakan strategi yang dapat memenangkan calon Legislatif yang di</p>

		bawah oleh partai. Serta calon Legislatif perempuan PPP kota Tanjungpinang dapat berperan aktif agar dapat membawa pemilih pada saat Pemilu.
--	--	--

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian diatas mengacu tentang politik perempuan dalam pemilu di legislatif dari segi yang sangat luas dan hanya salah satunya yang mengenai tentang partai islam atau PPP sedangkan penelitian ini mengenai tentang partai politik islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan representasi perempuan dalam pemilu di Yogyakarta yaitu di Kabupaten Sleman. Jadi penelitian di atas atau penelitian terdahulu membahas tetntang berbagai partai sedannngkan penelitian ini membahas satu topik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

F. KERANGKA TEORI

1. Reprntasi Perempuan dalam Politik

Reprntasi perempuan atau bisa disebut keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia sekarang ini belum ada perkembangan yang belum baik antara pemerintah lokal dan pusat. Karena sudah adanya afirmasi yang dapat mendukung keterlibatan ini seperli yang dapat di lihat di undang-undang pemilu yang diwajibkan keterlibatan perempua dari beberapa aktivitas politik minimal 30% pada pemilu 2014. Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik terbagi menjasi 3 aspek yaitu:

1. Pendapat konservatif yang mengatakan bahwa perempuan tidak layak terjun ke dunia politik, dikarenakan dunia perpolitikan dominan yang menjalankan laki-laki. Pendapat tersebut dari budaya patriarkhi.

2. Liberal progresif, dikarenakan perempuan dimuliakan dalam agama islam.

3. Pendapat apologis, pendapat ini tidak diperkenankan kerlibatan perempuan terjun di dunia politik.

Adapun upaya mewujudkan representasi perempuan di dunia politik salah satunya adalah perempuan harus berperan aktif dalam partai politik. Peran tersebutlah menunjukkan fungsi yang dijalankan partai politik. Fungsi tersebut adalah artikulasi kepentingan, pendidikan politik, rekrutmen politik serta komunikasi politik. Dan karena itu partai politik merupakan institusi politik yang dinamis di bandingkan lembaga lainnya (Windyastuti, 2004).

Dalam buku yang mengenai tentang Menyoal Data Representasi Perempuan dalam lima ranah oleh (Margaret 2018) berpendapat bahwasanya kebijakan afirmatif yang saat ini berlaku di Indonesia serta ditetapkan dalam undang-undang pemilu. dalm kebijakan afirmatif ini, saat diberlakukannya sejak pemilu 2004 sampai sekarang. dengan munculnya representasi perempuan dalam politik yang mengenai keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu dengan ketersediaan kuota 30% serta keterpilihan calon legislatif perempuan .

Menurut utari dalam (dwi, 2018) berpendapat bahwa dalam buku yang berjudul perempuan politik terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam keterwakilan perempuan, yaitu:

a. Faktor Pendukung

1. *Affirmative Action*

Affirmative Action merupakan keharusan kuota yang dapat melibatkan perempuan dalam segala yang berkaitan dengan politik, baik itu aktivitas di dunia parpol ataupun di dunia pemerintahan. Affirmative Action juga dapat dilakukan dengan salah satu cara pendidikan warga negara, hal tersebutlah agar dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dapat meningkat.

2. Partai Politik

Partai politik juga merupakan salah satu manifestasi suatu proses demokrasi yang terpenting dalam perpol. Partai politik selalu dapat memainkan perannya dalam suatu proses demokrasi institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok politik serta yang lainnya. Jadi partai politik ini mempunyai perannya yang sangat kuat.

b. Faktor Penghambat

Menurut Bari F (2010) terdapat beberapa hambatan dalam keterwakilan ini, yaitu:

1. Hambatan Sosio-Ekonomi

Hambatan sosio-ekonomi ini merupakan hambatan patrikai dari budaya Indonesia yang disebut dalam hambatan ini mempunyai nilai-nilai perspektif untuk menuntut perempuan tidak dapat berpartisipasi dlam ranah public atau pun pemerintahan, karena ranah tersebutlah sudah diduduki oleh laki-laki.

2. Hambatan Politis dan Kelembagaan

Salah satu praktik yang dianggap berkembang sudah lama di masyarakat luas dan sringkali tidak memperhatikan perkembangan kader-kadernya. Sehingga berakibat sringkali perempuan tidak dapat menduduki posisi dalam pengambilan keputusan, kerennya

perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk belajar di dunia politik. Bahkan tidak adanya dukungan dana dan kampanye pada saat pemilu berlangsung.

3. Hambatan Pribadi dan Psikologi

Perempuan selalu mempunyai pemikiran untuk berperan sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebutlah menjadikan prioritas yang utama bagi perempuan, oleh karena itu perempuan lebih mempertimbangkan dalam berpartisipasi di dunia politik. Serta terpaku terhadap ketidakpercayaan diri dan kurangnya keterampilan dalam politik merupakan salah satu hambatan pribadi.

Strategi untuk Meningkatkan Reprerentasi perempuan membangun serta memperkuat hubungan antara jaringan dan organisasi salah satunya adalah:

Indonesia sekarang ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia yaitu federasi dari 78 organisasi wanita yang saat ini melakukan kerjasama dengan perempuan dari semua agama. Serta adapun meningkatkan reprerentasi perempuan dalam organisasi ini yaitu:

1. Melakukannya advokasi dari pimpinan partai politik.
2. Membangun suatu akses ke dalam media.
3. Melakukan peningkatan dengan cara memberi menyalurkan pendidikan serta pelatihan.
4. Meningkatkan kualitas perempuan.
5. Memberikan peningkatan kuota dalam jumlah anggota.

2. Gender

Istilah gender sangat berbeda dengan seks, perbedaan tersebut untuk mengacu pada fenomena biologis, sedangkan gender tersebut mencu dengan sosial. Jadi dapat dikatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanyalah fungsi reproduksi saja.

Gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu peran, tanggungjawab, perilaku serta hak dan dibentuk dari tata nilai sosial, budaya dan adat, namun perbedaan ini dapat disebutkan oleh pakar-pakar antara lain. Menurut Herien Puspitawati (2013) gender menyangkut aturan-aturan sosial yang terkait dengan jenis kelamin manusia laki-laki maupun perempuan. Perbedaan biologis dalam reproduksi antara laki-laki maupun perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda.

Adapun beberapa dari mereka berpendapat mengenai gender, teori tersebut mengenai:

1. Teori Fungsionalisme Mariam Johnson berpendapat bahwasannya adanya suatu pandangan yang berat sebelah yang tidak sengaja dalam teori person mengenai keluarga serta fungsionalisme untuk memikirkan suatu masalah ketidaksetaraan sosial, dominasi serta yang dapat disebut penindasan. Di dalam pandangan perempuan mengalami kerugian di masyarakat karena pengaruhnya patriarki dalam keluarga.

2. Teori konflik Anaitik mengenai gender Janet Chafetz berpendapat bahwasannya pendekatan yang dapat dilakukan dalam lintas kultural serta historis dan mencoba merumuskan tentang teori gender di masyarakat mengenai pola-pola. Dan menyebutkan bahwa ketimpangan gender berasal dari laki-laki dan perempuan.

3. Teori sistem dunia dalam teori ini memandang kapitalisme global dan dijadikannya sasaran analisis sosiologi. B. Ward berpendapat bahwasannya sistem dunia tak dapat dimengerti kecuali dengan sektor informal diperhitungkan di analisis

serta karena proporsi wanita banyak terdapat ke dua sektor tersebut maka dari itu wanita perlu harus mendapatkan perhatian lebih.

Konsep gender serta pembangunan ini dilihat bahwa kontribusi sosial yang dapat membentuk suatu konsepsi serta harapan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam fungsi reproduksi serta produksinya. Dan seringkali di rendahkan nya kedudukan sttus perempuan dari laki-laki serta secara sistematis perempuan ditempatkan diposisi inferior dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Wawasan tersebutlah dengan melihat pembangunan gender harus dapat berubah agar menjadikan hubungan yang seimbang.

Menurut Khofifah Indar Parawangsa, dalam artian kesadaran gender dalam pembangunan yaitu:

1. Dalam pembangunan ini melibatkan laki-laki serta perempuan sesuai potensi yang dimilikinya.
2. Perempuan adalah salah satu wakil dari setengahnya jumlah penduduk.
3. Tidak untuk kesehatan saja maupun pendidikan serta di degi sosial secara proposional.
4. Peningkatan serta pembangunan pengalaman serta kreatifitas perempuan dan laki-laki.
5. Perempuan dan laki-laki di ikutsertakan dalam keputusan yang sama.

3. Pemilu

Pemilu sendiri dapat diartikan secara umum adalah suatu cara sarana atau prasarana untuk menentukan orang-orang yang akan berpartisipasi akan mewakili rakyat dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan melakukan pemilu. Pemilu (pemilihan umum)

merupakan suatu proses memilih salah seorang untuk mengisi jabatan politik sendiri. Jabatan itu sendiri beraneka ragam, mulai dari presiden serta wakil rakyat dari berbagai tingkat pemerintahan hingga kepala desa.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2012) pemilu merupakan suatu cara yang dilaksanakan untuk memilih dari bagian dari wakil-wakil rakyat dengan demokratis. Para wakil rakyat itu sendiri bertindak atas nama rakyat serta itu wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan cara bekaerjanya pemerintahan, dan tujuan yang akan dicapainya serta jangkauan tersebut memiliki panjang awat pendek. Agar dapat dipilihnya wakil-wakil yang memang benar melakukan dengan atas nama rakyat, dan karena itu wakil-wakil tersebut dapat ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu dengan melakukan nya suatu pemilihan umum (pemilu).

Menurut Profesor Maisel dan Buckley (2012) menjelaskan mengenai pengertian pemilu “ pemilu yaitu untuk memastikan suatu dukungan yang maksimal serta legimitasi yang diajukan para pembuat kebijakan di suatu pemerintahan.

Nurddin Hardy (2010) berbicara dengan pemilu keberadaan sistem sangatlah amat dibutuhkan terutama di Indonesia. Karena negara ini demokratis, pemilu tersebutlah salah satu sumber yang utama untuk suatu rekrutmen politis dengan partai politik sebagai suatu sarana yang utama dalam pecalonan. Serta dalam sistem yang politik yang demokratis, keadaan pemilihan umum yang babas serta adil adalah suatu yang sangat luarbiasa. Bahkan itu sistem politik yang lain yang di teraplan oleh negara, seringkali melakukan pemilu sebagai salah satu klaim demokrasi atas dari sistem politik yang dibangunnya. Dan karena itu dapat dipahami jika banyaknya ilmuan politik yang dapat menggunakan pemilihan umum sebagai salah satu tolah ukur dalam pelaksanaan demokrasi.

4. Partai Politik

Pengertian partai politik terdiri dari dua kalimat yaitu partai yang berarti sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan, agama serta kepentingan, sekelompok tersebut merupakan suatu organisasi dan yang dimaksud organisasi tersebut yang dapat membedakannya adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan organisasi politik. Sedangkan politik adalah pengelompokan yang bergerak dibidang politik itu sendiri.

Partai politik dalam pendefinisian dekemukakan berbeda-beda oleh seorang pakar. Menurut Markus Gunawan partai politiki dapat diartikan organisasi yang bersifat nasional serta dibentuk dari kelompokan warga negara Indonesia secara dasar atas kehendak untuk memperjuangkan kepentingan politik, masyarakat, bangsa serta Negara dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Carl Friedrich dapat mendefenisikan tetang partai politik (parpol) dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2013:277) memberi suatu batasan parpol sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah bagi pimpinan partainya serta berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan material dan ideal kepada anggota-anggotanya. Sedangkan soltau memberikan defenisi partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak teroganisasi, yang bertindak dalam kesatuan politik serta dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, hal tersebut bertujuan penting untuk menguasai suatu pemerintahan serta menjalankan kebijakan umum.

Menurut Sigit Pamungkas (2012) dapat dijelaskan beberapa defenisi yaitu partai politik adalah suatu organisasi yang merupakan etitas yang bekerja didasari suatu prinsip tertentu seperti adanya suatu kepemimpinan serta keanggitaan, devisionalisasi serata spesifikasi, selain itu partai politik adalah instrumen suatu perjuangan nilai atau ideologi.

Menurut Neumann partai politik sendiri merupakan suatu prantara dalam hubungan suatu kekuatan serta ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang adil. Selain itu adanya ilmuwan yang bernama Giovanni Sartori juga mendefinisikan soal partai politik yaitu: partai politik merupakan sekelompok politik yang berpartisipasi mengikuti pemilihan umum dalam pemilihan umum (pemilu) itulah mereka mendapatkan jabatan publik.

Dan secara umum Miriam Budiardjo berpendapat bahwasanya partai politik itu adalah salah satu kelompok yang terorganisir dan dalam anggotanya mempunyai orientasi serta cita-cita yang bertujuan sama. Tujuan tersebutlah untuk memiliki kekuasaan serta merebutkan kedudukan politik dan tujuan tersebut biasanya dengan dilakukan dengan melaksanakan program yang dapat dituju.

5. Partai Politik Islam

Partai politik Islam merupakan suatu pemikiran secara historis yang terpetakan dalam tiga periode dari awal terbentuknya pemikiran sampai sekarang yaitu periode klasik, pertengahan serta kontemporer. Pemikiran politik Islam sendiri dapat melahirkan tokoh intelektual seperti beberapa tokohnya adalah Ibnu Arabi, Al-Farabi, Al-Mawardi, Ghazali serta yang lain. Dan secara garis besar tokoh tersebutlah

Melalui ideology Islam dapat dilakukannya pencerahan serta perubahan beberapa aspek kehidupan diseluruh sector kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menjadikannya titik tolak arah bagi pembangunan bangsa ini. Dalam konteks politik tersebut teoritisme Islam dengan konsep demokrasi Theodemokrasi. Ideologi sebagaimana menurut Syariaty (192:148), memang memiliki pemihakan yang sangat berbeda di bandingkan dengan ilmu filsafat.

Beberapa pendapat para orientalis antara lain:

1. Dr. V. Fixgerad mengatakan bahwa Islam bukanlah hanya semata agama saja melainkan merupakan system politik. Meski ada decade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengatakan sebagai kalangan modrenis, yang dapat membadakan dari dua sisi, namun dari gagasan itu pemikiran Islam di bangun diatas kedua fundamen bahwasannya kedua sisi tersebut saling bergandengan.
2. Prof. C. A. Nallino mengatakan bahwasanya Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama serta Negara. Serta betas an territorial negara.
3. Prof. R. Schacht mengatakan bahwasanya Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencermintan tentang teori-teori, perundang-undangan serta politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan system peradaban yang mencakup agama serta negara.
4. Prof. R. Strothmann mengatakan Islam itu merupakan suatu fenomena agama serta politik karena penegak nya adalah nabi, yang juga merupakan politikus ataupun merupakan negarawan.

Jadi bahwa politik islam yang merupakan keterkaitan antara Islam serta politik yang ingin mewujudkan baik dari segi peraturan perundang-undangan, institusi ataupun system pemerintahan.

G. DEFENISI KONSEPSIONAL

Defenisi Konsepsional ini merupakan konsep yang dimaksud untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang akan diteliti. Konsep ini juga digunakan sebagai gambaran suatu abstrak tentang kejadian, ataupun keadaan suatu kelompok maupun individu yang menjadi sorotan perhatian di ilmu sosial.

Defenisi Konseptual merupakan pikiran umum yang menggambarkan hubungan konsep yang khusus yang akan menentukan variabel-variabel yang akan saling berhubungan ataupun memberikan batasan pengertian antara konsep yang satu dan yang lain agar tidak terjadinya kesalahan saat memahami suatu konsep yang akan didapatkan.

1. Reprntasi Perempuan dalam Politik

Reprntasi perempuan adalah aspek dari partisipasi dan merupakan suatu elemen yang penting jika membicarakan tentang mempromosikan demokrasi ramah gender atau gender democracy. Dan dengan itu bisa dikatakan bahwa tidak adanya demokrasi sejati tanpa melibatkan reprntasi perempuan di dlam itu serta memperebutkan hak perempuan tanpa diganggu gugat.

2. Analisis Gender

Gender adalah salah satu perbedaan makhluk hidup antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan dari segi lainnya adalah peran dan tanggungjawab yang dimilikinya, pemilu adalah salah satu partisipasi untuk memilih suara agar seseorang dapat mengisi jabatannya di dunia politik, dan partai politik adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk menjalani ideologi tertentu serta memiliki tujuan untuk membangun negara yang lebih baik.

3. Pemilu

Pemilu adalah salah satu sarana dan malakukannya partisipasi dalam ikut andil dalam melakukan tugas pemerintahan serta menduduki jabatan dalam politik.

4. Partai Politik

Partai politik adalah suatu organisasi dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah bagi pimpinan partainya, serta memiliki tujuan yang sama dengan persaingan memperebutkan kedudukan tertinggi.

5. Partai Politik Islam

Partai politik islam merupakan suatu organisasi mengenai social politik berideologi islam untuk merebutkan kekuasaan dalam pemerintah dengan menerapkan nilai-nilai islam.

H. DEFENISI OPERASIONAL

Defenisi operasional merupakan bagaimana cara melihat atau pun mengukur variabel, sehingga variabel ini akan benar-benar sesuai konsepnya sehingga menjadikan yang baik dan jelas. Agar suatu penelitian ini bisa diukur variabelnya maka dari itu sangat perlu dirumuskan sesuai karakteristik variabel yang sudah diteliti. Adapun beberapa variabel antara lain:

1. Reprerentasi Perempuan dalam Pemilu 2019 PPP di Kabupaten Sleman.
 - a. Keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu
 - Memenuhi kuota 30% dalam kepengurusan
 - Memenuhi kuota 30% dalam pencalegan
 - Terpenuhnya sistem *semi-zipper* yang mengharuskan minimal ada satu caleg perempuan
 - b. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu
 - Memperoleh kursi di parlemen
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Reprerentasi Perempuan dalam Pemilu 2019 PPP di Kabupaten Sleman.
 - A. Faktor Pendukung
 - a. *Affirmative action*

b. Partai politik

B. Faktor Penghambat

a. Hambatan sosio-ekonomi

- Beban ganda dalam kedudukan perempuan.
- Hambatan budaya patriarki
- Hambatan finansial

b. Hambatan politis dan kelembagaan

- Hambatan kurangnya partisipasi perkembangan kader-kadernya.
- Hambatan segi peran yang menjatuhkan kedudukan perempuan.
- Hambatan dukungan partai dari segi ekonomi hingga hambatan partai yang kurang berkembang.

c. Hambatan pribadi dan psikologi

- Hambatan motivasi guna terjun dalam dunia politik
- Hambatan rasa percaya diri
- Hambatan kurangnya keterampilan dalam politik

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian lazimnya pada saat penelitian sebuah metodologi sangatlah penting dalam suatu penentuan yang berhasil atau tidak, karena itu metodologi salah satu arah untuk menentukan dalam berfikirnya peneliti tersebut. teknik Reserch bahwasannya metodologi

sebagai salah satu tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Winarno surachman, 1996).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penjelasan permasalahan penelitian yang telah didasarkan pada data variabel serta tidak menggunakan angka yang akan ditarik kesimpulan dan secara umum menuturkan serta mendefenisikan data.

3. Unit Analisa

Unit analisa merupakan salah satu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek ataupun sasaran penelitian ataupun sasarang hingga fokus yang akan diteliti. Dalam unit analisa ini dilakukan berupa individu, kelompok dan wilayah sesuai dengan penelitian yang diambil.

Dalam peneliti ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Tetapi yang menjadi unit analisa tersebut adalah caleg perempuan terpilih dan caleg perempuan tidak terpilih dalam pemilu tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta pengurus partai tersebut di Kabupaten Sleman?

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diambil langsung dari responden untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkait dengn penelitian.

b. Data Sekunder

Data Skunder adalah perkumpulan data yang relevan yang dapat diambil dari sumber buku- buku, literatur serta peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat ukur yang di perlukan dalam melakukan penelitian menurut Nazir (2003).

Ada pun beberapa cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan dilakukannya dua teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukannya wawancara serta dokumen -dokumen yang bisa dijadikan sebagai alat untuk kelengkapan suatu penelitian .

a. Dokumentasi

Sugiyono (2015) berpendapat bahwa dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang terjadi atau catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen juga dapat berbentuk gambar, karya, dan tulisan. Dokumen yang berupa gambar itu seperti foto, dokumen yang berbentuk karya serta dapat berupa patung serta yang lainnya., sedangkan dokumen yang berupa tulisan yaitu kebijakan, peraturan serta sejarah.

b. Wawancara

Esterberg berpendapat bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk melakukan pertukaran suatu informasi serta ide dengan mempertanyakan atau tanya jawab dai orang yang akan melakukan survey, sehingga dapat dirumuskan makna dalam salah satu topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini merupakan teknik pengumpulan dengan bertahap.

Tabel 1.4 Teknik Pengumpulan Data

No	Kebutuhan Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1.	Data keterwakilam perempuan dalam pencalegan pada pemilu 2019 di Yogyakarta partai PPP	Dokumentasi	Data calon tetap perempuan DPRD Kabupaten Sleman tahun 2019 (Website resmi KPU

			RI
2.	Data keterpilihan perempuan dalam pencalegan pada pemilu 2019 di Yogyakarta partai PPP	Dokumentasi	Data penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Sleman tahun 2019 (Website resmi KPU RI)
3.	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan	Wawancara	Caleg terpilih PPP (H. Ngadiman, S.Ag, M.si)
4.	Data faktor penghambat keterwakilan perempuan	Wawancara	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (HM. Nashikin, SE)

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau tidaknya dari suatu hipotesis. Analisis data juga merupakan suatu proses merinci usaha secara formal untuk menemukan suatu tema serta merumuskan ide seperti yang telah disarankan oleh data sebagai usaha untuk bantuan tema serta ide yang.

Menurut Arikunto (2010) memaparkan bahwasannya teknik analisa data merupakan mengelompokan data-data berdasarkan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel serta menyajikan data yang tiap variabel yang telah diteliti.

Menurut Taylor (1979:79) analisis data merupakan proses merinci usaha secara formal untuk menentukan suatu tema serta dapat merumuskan hipotesis ide seperti yang telah diasankan dan sebagai usaha untuk memberikan tema pada hipotesis.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang akan dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu pengumpulan data dalam arti secara kasar yang berada di lapangan. Reduksi data dapat di lakukan dengan membuat suatu ringkasan tentang data-data yang akan didapat serta pengumpulan data yang berada di lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu penggambaran keadaan secara singkat dengan data yang telah di ringkas serta di sajikan dalam laporan yang sistematis serta mudah di pahami.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan suatu kesimpulan terhadap data yang di dapatkan atau di peroleh yang telah di reduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan serta memilih data yang pengaruh terhadap permasalahan dan menjawab permasalahan hingga dapat disimpulkan dengan valid